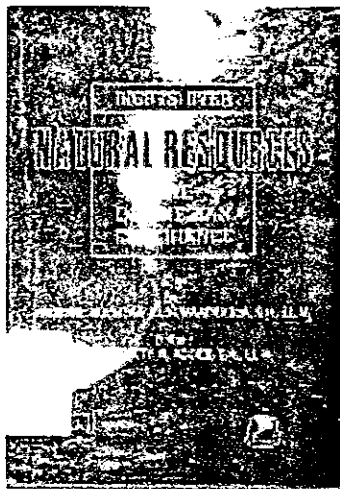


BOOK REVIEW

"Rights Over Natural Resources: The Indonesian Experience"

Pengarang : Prof. Mochtar Kusumaatmadja
Editor : Prof. Etty R Agoes
Penerbit : Alumni Publisher Bandung,
Tahun Terbit : 2002
ISBN : 979-414-319-7
Peresensi : Fatiah, S.H., LL.M.



Pertama-tama perlu di catat bahwa buku yang ditulis dengan Bahasa Inggris ini merupakan kumpulan dari tulisan-tulisan Profesor Mochtar Kusumaatmadja, baik yang ditulis sendiri maupun bersama penulis lain, serta tulisan-tulisan Profesor Etty R Agoes, yang merupakan dua pakar hukum laut baik di mata masyarakat Indonesia maupun masyarakat Internasional. Seperti yang telah diakui umum, Profesor Mochtar Kusumaatmadja adalah Mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga anggota *International Law Commission* yang berjasa besar dalam perkembangan hukum laut Indonesia.

Dalam buku ini, Prof. Etty R Agoes menyumbangkan beberapa tulisannya yang bertemakan hukum laut. Para editor buku ini memberi catatan penting di bagian depan buku mengenai terjadinya perubahan-perubahan sejak terbentuknya tulisan, dan bahwa meskipun demikian, buku ini patut mendapat tempat penting yang mampu memberikan para pembacanya sebuah pandangan historis mengenai eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam selama jangka waktu satu dekade terakhir.

Indonesia sebagai Negara Kepulauan memiliki hak dan kewajiban seperti yang tertera dalam UNCLOS 1982 Part IV yang membedakan Indonesia dengan negara-negara lainnya, seperti misalnya hak dan kewajiban negara pantai. Menurut konsep yang dianut Indonesia sejak masa penjajahan Belanda, hak atas sumber daya mineral merupakan hak

yang terpisah dari hak atas tanah. Hal ini merupakan lanjutan dari tradisi hukum Belanda pada 1899, yang tercantum dalam *Indische Mijnwet* (*Mining Act of the Indies*).

Dalam buku ini, Penulis mengangkat ketentuan-ketentuan dasar dalam *Production Sharing Contract* (Kontrak Bagi Hasil, "PSC"). PSC digambarkan sebagai "a contract between the owner of the resources, that is, the Indonesian State represented by the state oil company, Pertamina, and the contractor, that is, the oil company assign a certain contract area". Pada saat ini, definisi yang diberikan penulis telah mengalami sejumlah perubahan dalam perundang-undangan yang terkait dengan Minyak dan Gas Bumi. Terutama sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002, wewenang PERTAMINA sebagai pihak Pembina dan Pengawas bagi Kontraktor untuk PSC beralih kepada Badan Pelaksana (dalam hal ini Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi atau BP MIGAS).¹

Dalam buku ini juga, Profesor Mochtar Kusumaatmadja menjabarkan beberapa masalah hukum dalam perkembangan sumber daya mineral di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pemindahan peralatan setelah kontrak selesai, perundingan lingkungan laut, dan juga permasalahan pengukuran perbatasan. Masalah yang terakhir disebut tadi dinilai oleh Penulis sebagai salah satu penyebab potensial timbulnya sengketa antara perusahaan minyak dengan negara terkait. Selain pembahasan mengenai PSC dalam kaitannya dengan sumber daya mineral, Penulis juga memasukan pembahasan mengenai sumber daya hayati dalam lingkup kelautan nasional. Masalah hukum perikanan merupakan sub-subyek yang dibahas secara menyeluruh; mulai dari perikanan tradisional sampai kepada pengaturan mengenai kerjasama dengan negara asing. Dalam hal ini Penulis mengemukakan hal tersebut sebagai dasar dari konsekuensi diakuinya Negara Kepulauan dalam UNCLOS 1982, dimana Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki hak berdaulat atas seluruh sumber daya di dalam rezim perairan kepulauan (*archipelagic waters*) tersebut.

Tidak hanya hal-hal yang disebutkan di atas, pada Bab 4, berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan dampaknya

¹ *Laporan Akhir Kajian "Production Sharing Contract"*, Kerjasama Biro Hukum Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia-Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, 2005, hal II-11

terhadap lingkungan hidup, Penulis membahas mengenai penanganan polusi laut dan bahan berbahaya, khususnya mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban di daerah pesisir, sebagai akibat pelayaran di Selat Malaka dan di perairan Singapura. Mengenai aspek hukum dan kelembagaan dari pengaturan wilayah pantai di Indonesia, dibahas dalam Bab 5. Penulis juga menyajikan analisa peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan lingkungan hidup pada masa itu (yaitu pada tahun 1993 saat tulisan tersebut dipublikasikan).

Dua tulisan terakhir dalam Bab 6 dan Bab 7 buku ini merupakan tulisan dari Profesor Etty R Agoes. Bagian lain yang penting dan perlu dicatat adalah bagian mengenai pembahasan ketentuan-ketentuan mengenai Kepulauan dalam UNCLOS 1982. Dalam tulisan yang disajikan di Bab terakhir buku ini, Penulis memberikan penjabaran terhadap masalah-masalah penting mengenai pengaturan Kepulauan oleh UNCLOS 1982. Penjabaran ini juga dilengkapi dengan Praktek Indonesia sebagai salah satu Negara Kepulauan yang memegang peranan penting dalam perhubungan laut.

Sebagai akhir kata, kumpulan tulisan ini akan sangat membantu pengetahuan dalam hal hukum laut, terutama aspek-aspek hukum internasional dari sumber daya alam yang terkait dengan hukum laut. Pembahasan yang diberikan tidak hanya pembahasan mendasar teoritis yang dapat membantu peneliti maupun mahasiswa yang sedang mendalami subyek ini, namun juga bersifat teknis sehingga data memberikan gambaran menyeluruh tentang peralatan hukum terkait mengenai pemanfaatan sumber daya alam, khususnya sumber daya alam di Indonesia.